

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2010

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Tanggal 4 Januari 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka berikut ini diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2010. ILPPD Daerah Kota Parepare Tahun 2010 ini adalah merupakan **ringkasan** dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare dalam visinya sebagai Kota Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, religius dan berkomitmen Lingkungan.

Dalam rencana strategis pembangunan daerah Kota Parepare secara garis besar dapat digambarkan sebagai sebuah kota dengan fungsi dan peran dengan fasilitas pelayanan antar wilayah. Bidang perekonomian yang paling pesat pertumbuhan dan peranannya dalam menghasilkan pendapatan daerah adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selama lima tahun terakhir (2005 – 2009) sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,74% pertahun dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 9,14 %. Namun tahun berikutnya sektor ini hanya mampu tumbuh sebesar 4,00% dan pada tahun 2009 sektor ini tumbuh sebesar 5,84%.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2010 merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare 2008-2013, dengan visi ***“Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani***

dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan”.

Untuk mendukung visi tersebut, maka dirumuskan misi Pemerintah Kota yang diarahkan pada : ***pertama***, mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; ***kedua***, mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat; ***ketiga***, mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota; ***keempat***, mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan; ***kelima***, mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis; dan ***keenam***, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 terdiri dari: (1) Pengembangan Parepare sebagai **Kota Jasa dan Niaga**; (2) Pengembangan Parepare sebagai **Kota Pendidikan dan Kota Sehat**; (3) Pengembangan Parepare sebagai **Kota Maju**; (4) Pengembangan Parepare sebagai **Kota Hijau**; (5) Pengembangan Parepare sebagai **Kota Rohani**; dan (6) Pengembangan Parepare sebagai **Kota Pelayanan**.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DESENTRALISASI)

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare tahun 2010, berikut uraian capaian pelaksanaan program-program pembangunan menurut **urusan wajib** dan **urusan pilihan** yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk urusan ini adalah sebesar Rp 156.843.167.473,- dengan realisasi anggaran Rp 135.064.112.970,- atau 97.04 % yang dilaksanakan dalam empat program:

- 1) *Program Pendidikan Anak Usia Dini*. Terdapat tujuh kegiatan, antara lain pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebagai alat bantu dan media bagi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik sangat diharapkan untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam mengajar, membimbing dan melatih peserta didik agar lebih variatif.

- 2) *Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah.* Program Wajar Dikdas 25 kegiatan dan Program Dikmen terdapat 21 kegiatan, antara lain pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan. Pada Tahun Pelajaran 2010/2011 jumlah siswa SD/MI sebanyak 17.871, siswa SMP/MTs sebanyak 7.796, siswa SMA/MA/SMK sebanyak 7.837. Peningkatan daya tampung diikuti peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK SD 122,02%, SMP 103,61% dan SM 119,20%. Peningkatan APK ini, disebabkan oleh peningkatan kuantitas dan kualitas ruang kelas melalui pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi.
- 3) *Program Pendidikan Non Formal,* terdiri 14 kegiatan, antara lain pelatihan kompetensi tenaga pendidik (tutor) dan penyelenggaraan kursus untuk peningkatan keterampilan masyarakat.
- 4) *Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan,* terdiri 4 kegiatan, antara lain kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk mengoptimalkan kemampuan dan potensi tenaga pendidik dan pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh dua satuan kerja perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan dan BPK. RSUD. A. MAKKASAU dengan total anggaran belanja Rp. 67.564.171.631. Realisasi anggaran sebesar Rp. 51.542.086.295 dengan program kegiatan sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan

- 1) Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri 4 kegiatan dengan anggaran Rp.2.745.564.000,-, realisasi Rp. 2.404.287.007,- atau 87,57 %.
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri 22 kegiatan. Anggaran Rp. 5.433.481.800,-, realisasi Rp. 5.261.843.207,- atau 96,84 %.
- 3) Program Program Pengawasan Obat dan Makanan. Satu kegiatan dengan anggaran Rp. 49.980.000,-, realisasi Rp. 49.980.000,- atau 100 %.
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Empat kegiatan, anggaran Rp. 307.348.625,-, realisasi Rp. 303.239.875,- atau 98,55 %.

- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, satu kegiatan, anggaran Rp. 210.620.000,-, realisasi Rp. 740.000,- atau 0,35 %.
- 6) Program Pencegahan Penyakit Menular, 9 kegiatan, anggaran Rp. 615.167.030,- realisasi Rp. 548.276.330,- atau 88,8 persen.
- 7) Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, 7 kegiatan, anggaran Rp.2.820.090.301, realisasi Rp. 2.582.644.315,- atau 91,58 %.

Dari keseluruhan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2010 oleh Dinas Kesehatan, anggaran keseluruhan (Belanja Langsung) Rp. 13.135.748.256,-. Realisasi fisik 94.11 persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.066.087.396,- atau 91,86 persen, Sedangkan Belanja Tidak langsung Rp. 13.901.645.000,- realisasi Rp. 10.992.696.728.

BPK. RSU. A. MAKKASAU

- 1) *Program upaya kesehatan masyarakat.* Anggaran Rp 5.045.000.000. Kegiatan JAMKESDA, Pelayanan JAMKESMAS serta Pembangunan Ruang Khusus Merokok.
- 2) *Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.* Anggaran Rp 300.000.000. Kegiatan pelayanan kesehatan keluarga miskin.
- 3) *Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.* Anggaran Rp 12.420.524.875. Kegiatan diantaranya: rehabilitasi bangunan rumah sakit, penambahan ruang rawat Inap RS (VVIP,VIP, kelas I,II,dan III), pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit serta pengadaan obat-obat rumah sakit dan pengadaan mebeuleur rumah sakit.
- 4) *Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.* Anggaran Rp 3140.000.000. Kegiatan diantaranya: pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit, pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumahsakit serta pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah dan pemeliharaan rutin/berkala mebeleir rumah sakit.
- 5) *Program kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic.* Anggaran Rp. 254.000.000. kegiatan: kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic, dan kemitraan peningkatan kualitas karyawan RS.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) *Program Upaya Kesehatan Daerah.* Kegiatan pelayanan JAMKESDA, terealisasi anggaran Rp 4.3841.875.552,- atau 95,97 % dengan jumlah kunjungan rawat jalan 11.136, kunjungan dan rawat inap 5.736 kunjungan. Pembangunan Ruang Khusus Merokok, belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan.
- 2) *Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.* Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin, Realisasi anggaran Rp 266.682.814,- atau 88,89% dengan jumlah kunjungan rawat jalan 4.836 dan rawat inap 776 kunjungan.

3) Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh dua satuan kerja perangkat daerah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 13.488.479.198 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.957.473.674. Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

Dinas Kebersihan dan Pertamanan: *Program pengelolaan ruang terbuka hijau.* Kegiatan penataan taman-taman kota dan pengadaan bibit tanaman hias dan penghijauan. Anggaran yang digunakan mencapai 60%. *Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.* Kegiatan pengadaan tong sampah dan bak sampah serta pembersihan lingkungan perkotaan dengan tingkat capaian kinerja SKPD sebagai berikut :

(a) Penanganan sampah; sampah produksi masyarakat (perhari) 499 m³, berhasil ditangani 489 m³ atau 97,53%.

(b) Ketersediaan TPS; Daya tampung TPS /Kontainer 620 m³.

Selama periode Tahun 2010, kegiatan pembangunan dan pembinaan Lingkungan Hidup memperlihatkan peningkatan kinerja yang memuaskan, dibuktikan dengan : *Anugrah Piala Adipura kategori Kota Sedang* yang diserahkan oleh *Presiden RI* pada *Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2009 di Istana Negara.*

Badan Lingkungan Hidup Daerah, pada Tahun Anggaran 2010 melaksanakan antara lain :

(a) *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.* Kegiatan yang dilaksanakan: *Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan serta Kegiatan Pengelolaan Pengkomposan.* Tempat pelaksanaan: TPA AloppoE, Pasar Lakessi serta 10 lokasi perumahan sebagai

percontohan. Output \pm 10 ton dan penjualannya memberikan kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Parepare.

- (b) *Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Outcome: *Anugrah Piala Adipura kategori Kota Sedang* yang ke-6 kalinya pada tahun 2010.
- (c) *Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam*. Kegiatan *pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lingkungan* seperti: kendaraan pick up, tempat sampah, peralatan kerja, peralatan & perlengkapan laboratorium, pembangunan talud an reservoir, taman, gedung pengkomposan, bibit tanaman dan lain - lain.
- (d) *Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Kegiatan: *Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan* serta pelaksanaan *Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup*.
- (e) *Program Peningkatan Pengendalian Polusi*. Kegiatan: pengujian sampel air di 3 titik Daerah Aliran Sungai Karajae, pengujian kualitas udara di 5 titik serta pengujian terhadap kegiatan pelaku usaha dan atau kegiatan sebagai salah satu tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.
- (f) *Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*. Kegiatan: penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau berupa pengadaan bibit tanaman, sungkup dan alat – alat penunjangnya.

4) **Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum**

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini Rp 154.481.091.541,- dengan realisasi anggaran Rp 89.226.574.661,-, atau sebesar 55.03 %.

- a) ***Program Pembangunan Jalan dan Jembatan***. Kegiatan: Pembangunan jalan maupun jembatan sebagai bagian dari pengadaan sarana/fasilitas umum. Adapun capaian kinerja: panjang jalan bertambah 24.930 m², perintisan jalan 5200 m², Pembangunan dan rehabilitasi trotoar 2990.40 m², Penyediaan aspal buton dan mixer untuk penanganan kerusakan yang bersifat insidental, serta peningkatan kondisi ruas jalan tanah menjadi aspal sepanjang 84.330.08 m².
- b) ***Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong***. Kegiatan: pembangunan saluran drainase, dan perbaikan saluran drainase dan gorong-gorong 6.126 m².
- c) ***Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan***. Kegiatan: terpeliharanya jalan 40.542m², terpeliharanya jalan

sepanjang 5.000 m², peningkatan kualitas jalan sebanyak 4 paket (lanjutan 2009).

- d) **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.** Kegiatan: pengadaan 1 unit reservoir kav 200 m³, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 200 H, pengadaan pipa dan asesoris jaringan air minum masing-masing 1 unit, pembangunan banding 7 ungu dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), terbangunnya Tanggul Tonrangeng dan Penataan kawasan Lontangeng melalui Pembangunan Pantai dengan bersumber Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
- e) **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.** Kegiatan: pembangunan Pasar Lakessi (tahap finishing), penataan kawasan Jl. Mattirotasi 3.738,32 m², pembangunan sarana dan prasarana Olah Raga, terbangunnya 1 unit pembangunan pelataran/landasan Kontainer untuk memperlancar arus lalu lintas serta mobilitas masyarakat.

5) Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Penataan Ruang

Anggaran Rp 7.212.059.600,- realisasi Rp 6.422.052.730,-, atau sebesar 55.03 persen. Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan

- a) **Program Lingkungan Sehat Perumahan.** Kegiatan pembuatan sumur umum dan MCK, di 4 (empat) kecamatan.
- b) **Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman.** Kegiatan pemantauan dan pendataan IMB perumahan serta penertiban bangunan dalam kota yakni mendata bangunan berdasarkan jenis bangunan serta kepemilikan IMB.
- c) **Program Peningkatan Kawasan Perkotaan.** Kegiatan pembangunan jalan lingkungan/lapin, jalan setapak, saluran penutup saluran, dan plat duiker di 22 Kelurahan 60 paket.
- d) **Program Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman Kumuh.** Kegiatan perbaikan jalan setapak di Kelurahan Kampung Baru, Sumpang Minangae, dan Lumpue.
- e) **Program Peningkatan dan Pelayanan Perizinan.** Kegiatan sistem komputerisasi data Base IMB; Pembuatan papan display dan informasi IMB di 5 titik lokasi yaitu Jl.H.A.Muh. Arsyad, Jl.Industri Kecil, Jl. A.Yani, Jl. Perumnas Wekke'e, Jl. Laupe.

f) **Kegiatan Penyusunan Ranperda tentang Bangunan.** Konsep ranperda telah disosialisasikan ke masyarakat, SKPD, kecamatan dan kelurahan, stakeholder masalah perumahan, REI, UMPAR, STM Negeri, dan LSM, melalui bagian hukum selanjutnya akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Program perencanaan tata ruang. Kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, menghasilkan RDTR Kota Parepare sesuai arahan dari RTRW Kota Parepare tahun 2008 – 2028 sejumlah 80 eksamplar, 5 Compac Disc. Terealisasi 100%. Perdagangan dan Jasa Lekssi serta Pesisir Pantai Kota Parepare dengan jumlah dokumen 40 Examplar, 2 Album Peta Uk.A1, 3 Album Peta Uk. A3 dan 6 CD dengan anggaran Rp 403.085.000,-. Realisasi keuangan Rp 357.162.500,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Program pengendalian pemanfaatan ruang, Kegiatan pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare. Output: Surat Keputusan Walikota tentang Tim BKPRD dengan jumlah personil 37 orang.

6) **Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik**

Badan Perencanaan Pembangunan

Alokasi anggaran Rp 6.106.973.110,- dan realisasi Rp 5.587.874.939,-, atau sebesar 55.03 persen.

Program Perencanaan Pengembangan data / informasi, Kegiatan: penyusunan profil daerah Kota Parepare, pembuatan website Bappeda 1 unit, dan Rekonsiliasi DAK dan DPDF.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, kegiatan fasilitasi operasional forum komunikasi peduli teluk parepare kepada 3 Babupaten/Kota realisasi kegiatan 100%.

Program peningkatan Kapasitas Kelambagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan Bimbingan teknis bagi TAPD dan Staf Perencana Bappeda sebanyak 14 orang dengan realisasi kegiatan 0% atau tidak terlaksana.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan: penyelenggaraan Musrebang, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdapat 5 item kegiatan yaitu kegiatan indikator ekonomi daerah, kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Ekonomi masyarakat menghasilkan 2 jenis dokumen yaitu dokumen kajian penelitian dan

penerapan teknologi madya bagi IKM dan dokumen kajian system bantuan permodalan bagi UMKM, sedangkan kegiatan kajian ekonomi syariah menghasilkan dokumen informasi tentang sistem ekonomi syariah, dan kegiatan identifikasi ketimpangan kemiskinan perkotaan menghasilkan dokumen data dan informasi tentang ketimpangan pendapatan masyarakat, serta koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah adalah menghasilkan tim koordinasi yang mengidentifikasi usulan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD terkait.

Program Perencanaan Sosial Budaya. Kegiatan: koordinasi penyelenggaraan kota sehat, penyusunan indeks pembangunan manusia adalah dokumen/buku indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Parepare sebanyak 35 eksamplar, kajian pengelolaan sampah medis rumah sakit (RSUD. A. Makasau), serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan untuk semua (PUS).

Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam. 10 kegiatan: pengawasan manajemen reformasi pengembangan perkotaan, penelitian geolistik air tanah, penelitian kondisi intrusi air laut, penyusunan data base sumber daya alam, kajian pengembangan hutan raya dan hutan plasmanutfah, kegiatan pembibitan tanaman adalah terbangunnya tempat pembibitan tanaman di kebun raya Parepare (hutan jompie), eksplorasi dan pengayaan tanaman dari 2 kabupaten di sulsel untuk koleksi tanaman kebun raya parepare, pembangunan pintu gerbang kebun raya parepare 1 unit, dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan, serta penyusunan perda konservasi sumberdaya alam. Kesepuluh item kegiatan pada program ini terealisasi 100%.

Urusan Statistik

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistic Daerah. Kegiatan: penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, dan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data PDRB, Kedua item kegiatan pada program ini terealisasi 100%.

7) Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

Anggaran Rp. 3.493.941.620,- realisasi Rp. 2.992.282.559.

Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Kegiatan: Pelatihan pemuda pelopor dengan, Jambore pemuda pelopor, Bintek manajemen kepemimpinan dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemudaan (Pelatihan Paskibraka dengan peserta

sebanyak 64 orang, dan Pelatihan Aubade dengan peserta 120 orang); Kegiatan Fasilitas pekan temu wicara organisasi pemuda.

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas Stadion Gelora Mandiri; kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Andi Makkasau, dan Gedung KONI Parepare.

8) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Kegiatan pemberian bantuan peralatan jualan gendong bagi pedagang kaki lima sebanyak 99 unit.

Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif UMKM. Kegiatan: penagihan dan penyelesaian dana bergulir.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. Kegiatan pemberian bantuan mesin/peralatan penunjang usaha, kegiatan pameran dekranas ditingkat Nasional, Pameran Produk Indonesia (PPI) serta pameran pembangunan, BINTEK home industri serta pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional Wekkee.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Kegiatan: seleksi dan auditing 77 koperasi berprestasi, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan koperasi. Untuk tahun 2010 terdapat 76 unit koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pencapaian SHU Rp 2.665.150.000,-. Perkembangan jumlah modal sendiri Rp 31.574.800.000,- untuk modal luar Rp 35.326.670.000 dengan jumlah anggota sebanyak 27.150 orang.

9) Urusan Kependudukan, Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan

Dilaksanakan dua SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Pelatihan Kerja. Anggaran Rp. 6.909.306.335,- dan realisasi Rp. 6.299.679.054:

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dalam bentuk penyediaan blangko / formulir untuk pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK) dan formulir pendukung lainnya.
- b) Penyusunan Ranperda dan Regulatory Impact Assesment (RIA).
- c) Penyusunan Resnstra Pencatatan sipil.
- d) Pendataan Ulang Penduduk.

Urusan Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan: Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Akreditasi satu lembaga pelatihan kerja swasta dari 20 LPK yang aktif dalam wilayah Kota Parepare, Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja, Pengukuran produktivitas tenaga kerja wanita sektor informal. Selanjutnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Swasta dan Perusahaan, Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan, serta Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja: Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Strategi Peningkatan Kerja, serta Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Juga Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI serta Pengoperasian System Pelayanan TKI Satu Atap

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan. ***Kegiatan:*** pemeriksaan, pembinaan, penyuluhan dan kunjungan keperusahaan dalam bentuk tim, disamping itu juga dilaksanakan sosialisasi dan pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan kerja. Dana Rp. 413.760.000,- dan realisasi Rp. 406.956.000,- atau 98 % sisa anggaran sebesar Rp. 6.804.000. ***Kegiatan:*** Pemeriksaan uji kelayakan objek K3 atas penggunaan/pemakaian mesin/genset dan pesawat angkot dan angkut sebanyak 12 objek diperusahaan. Juga pemeriksaan Norma Kerja dan pelaksanaan Undang-undang No.1/1970 tentang Keselamatan kerja 12 perusahaan, dengan dana Rp. 50.800.000. Selanjutnya sosialisasi terhadap pekerja dan pengusaha 6 angkatan, 200 peserta, anggaran Rp. 117.796.000. ***Kegiatan*** pembebasan pekerja anak dari pekerjaan terburuk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Galung Maloang dengan anggaran Rp. 69.800.000, pemeriksaan dokumen 6 PPTKIS, anggaran Rp. 10.350.000, fasilitasi kasus PHK, upah dan jaminan sosial ketenakerjaan sebanyak 40 kasus dengan anggaran Rp. 46.530.000 serta sosialisasi Upah Minimum Provinsi, anggaran Rp. 111.680.000.

Kantor Pelatihan Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja. ***Kegiatan*** pengadaan peralatan, peningkatan profesionalisme

tenaga pelatihan dan instruktur serta pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja.

10) Urusan Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Alokasi anggaran Rp 1.471.629.500. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Output: 30 kelompok tani di 22 kelurahan. Kemudian Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan, Pendataan statistik, Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan, Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan, Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan, Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah, Terpenuhinya informasi laporan kondisi pangan pada setiap daerah secara berkala dan berkelanjutan, Pemanfaatan Pekaraangan Untuk Pengembangan Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, serta Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan Setiap Posyandu.

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Kegiatan: pengembangan pembibitan 4.500 kg benih jagung.

11) Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Dilaksanakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Anggaran Rp. 4.408.449.200,- realisasi Rp. 3.979.554.626.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, anggaran Rp. 88.660.000. Kegiatan: Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosialisasi 50 orang perhari oleh siswa siswi tingkat SLTP,

Lomba cerdas cermat tingkat SLTP, serta Pemberian Tabanas kepada anak keluarga pra sejahtera yang berprestasi disekolah sebanyak tingkat SD 5 orang, SMA 5 orang dan SMK 5 orang.

Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Anggaran Rp. 42.780.000. Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), Pembentukan Tim Pemantau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Program Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Kegiatan: sosialisasi Gender serta Cetak Brosur tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender,

Partisipasi Perempuan dalam pencegahan HIV / AIDS, Membangun Karakter dan budi pekerti Bangsa, kejahatan dan perdagangan anak.

Program peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan Anggaran Rp. 23.180.700 dalam pemberian petunjuk teknis cara Pengisian Buku Register & Blangko Laporan untuk mencatat dan menghimpun data kasus KDRT & Anak, peserta 198 orang.

Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan dalam pembangunan. Anggaran Rp. 247.000.000. Kegiatan: Kegiatan pembinaan organisasi perempuan, dan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS).

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Pemberian pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin terlaksana dengan baik melalui kegiatan Bulan bakti IBI, KB-Kesehatan, TNI maninggal, KB kesehatan dan kesatuan gerak PKK KB kesehatan serta kegiatan Pelayanan KIE, dan Promosi Pelayanan Khiba, Pembinaan Keluarga Berencana. Ppencapaian Akseptor/ peserta KB meningkat. Akseptor Baru target 6.006, tercapai 6.146 (102.33%). Kemudian kegiatan Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi. Jumlah Peserta KB: 1.051 tahun 2009, 1.224 tahun 2010 (naik 16.46%). Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dalam bentuk lomba penyuluhan dan karya tulis tentang KB, kesehatan reproduksi remaja, seksualitas, nafsu dan HIV/AIDS. Kemudian Orientasi BKB, BKR, BKL, dengan jumlah dana Rp. 87.860.000. Orientasi keluarga bagi PUS menuju keluarga sakinah dengan jumlah dana Rp. 16.000.000.

16. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, keuangan 85,5% dan fisik 100% dan satu kegiatan tidak terealisasi: Penyebarluasan informasi interaktif.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam bentuk kegiatan, antara lain: Penyusunan kebijakan Norma standar dan prosedur bidang perhubungan. outcome: lomba tertib lalulintas (Anugerah Wahana Tata Nugraha). Koordinasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Outcome terwujudnya tertib lalulintas dan minimalisasi terminal bayangan.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Prasarana fasilitas LLAJ, kegiatan antara lain: Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan dalam bentuk 3 paket, antara lain:

Pemagaran area terminal induk sepanjang 146 m³, Pemagaran terminal soreang sepanjang 74 m³ serta Pengecatan pelataran terminal lumpue.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dala bentuk:

Kegiatan uji kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang, Kegiatan pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum dijalan raya, Pelaksanaan, serta Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas, Mengadakan penyuluhan kepada juru parkir untuk meningkatkan PAD dengan jumlah juru parkir yang diakomodir sebanyak 50 orang. Realisasinya keuangan 97,3% dan fisik 100%.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dalam

bentuk: Pengadaan rambu lalu lintas kegiatan ini dilakukan di 4 kecamatan dan 3 titik traffight laight yaitu Baumassepe 6 Rambu ganda jl.matirotasi dan Agussalim 32 rambu tunggal. Pengadaan Marka jalan kegiatan tersebut diadakan di 3 titik area yaitu : Jl. Mattirotasi Baru, Jl. Bau Massepe sekitar lapangan Andi Makkasau, Jl. Andi Isa (UJUNG) dan Jl. Veteran. Pengadaan Warning Light kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 titik area: Jl. Bau Massepe, Jl. Mattirotasi, Jl. Abubakar lambogo serta Jl. Ambo Matti.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa

Pembinaan & pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Alokasi anggaran Rp. 17.500.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%..

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Program tersebut kerjasama dengan mas media, anggaran Rp. 404.992.800,- dengan kegiatan antara lain : penyebarluasan hasil-hasil pembangunan, anggaran Rp. 35.000.000,- Realisasi keuangan dan fisik 100%. Kemudian Pelayanan sistem KIM Rp. 66.000.000. Realisasinya keuangan 73,65% dan fisik 100%. Operasional Radio Pare Bandar Madani Rp. 145.000.000. Realisasi keuangan 83,22% dan fisik 100%. Dokumentasi Pembangunan daerah Rp. 42.000.000,-Realisasi keuangan dan fisik 100%. Penyebarluasan Informasi (KIM) Rp. 94.092.800,- relialisasi keuangan 97,31% dan fisik 100%. Penyebarluasan Informasi bersifat penyuluhan Rp. 13.500.000,- realisasinya fisik dan keuangan 100%. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan Interaktif dimana kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan karena anggaran tidak memungkinkan (Rp. 9.400.000,-)

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Kumpulan dan Kenyamanan Lingkungan

terbagi atas Empat (4) kegiatan yaitu, (1). pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (200 Orang Tenaga Linmas dan Pengamanan lainnya, dilaksanakan selama tiga hari, (2) kegiatan pengendalian kebisingan (100 Orang yang terdiri dari kalangan Tokoh Masyarakat, Ketua RT dan RW), berlangsung selama empat hari, (3) kegiatan pengendalian keamanan lingkungan (lomba poskamling), serta (4) kegiatan forum koordinasi pengawasan orang asing dan narkoba serta pemantauan orang asing (60 Orang).

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Tujuh kegiatan yaitu, (1) peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (200 Orang aparat keamanan dan dilaksanakan selama dua hari), (2) kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah (42 Orang), pembentukan Panitia Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), (3) pembentukan satuan keamanan lingkungan (240 Orang peserta) yang mencakup berbagai unsur dalam masyarakat selama 2 hari. (4) penyuluhan kewaspadaan dini masyarakat, PNS dan kelurahan selama 3 hari, 85 Orang peserta. (5) pelatihan bela Negara (50 Orang siswa). (6) sosialisasi pemulihan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak criminal (75 Orang), berlangsung 2 hari. (7) kegiatan posko terpadu.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Dua kegiatan antara lain kegiatan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pemerintah Kota, dan Rapat Koordinasi (rakor) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri selama 4 hari (120 Orang Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama).

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Empat kegiatan:(1) penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (75 orang) dilaksanakan dalam 3 hari, (2) penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi, selama 3 hari untuk 50 Orang. (3) penyuluhan pencegahan praktek perjudian (50 Orang peserta) selama 3 hari. (4) penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur, 50 orang tokoh masyarakat dan ketua ORW) selama 3 hari.

Program pendidikan politik masyarakat. Lima kegiatan: (1) kegiatan monitoring, evaluasi pelaporan dan pendataan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik (Parpol), Organisasi Massa (Ormas) serta Organisasi Pemuda di Kota Parepare. (2) Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada 12 (dua belas) Partai Politik. (3) Workshop politik pemuda dan gender, organisasi pemuda dan masyarakat (300 Orang). (4) kegiatan forum komunikasi dan pertemuan berkala ormas, LSM dan Pemerintah Daerah. (5) kegiatan Analisa Etika Budaya Politik.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Tiga kegiatan antara lain; (1) pemantauan penyebarluasan informasi potensi bencana di buat 4 unit papan billboard serta menyiapkan alat komunikasi berupa handy talky sebanyak 5 unit. (2) kegiatan simulasi penanganan bencana dan pengungsi untuk 75 orang dalam waktu 3 hari. (3) pelatihan anggota satlak selama 3 hari untuk 75 orang.

Satuan Polisi Pamong Praja

Program peningkatan sumber daya aparatur, dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan formal.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dilaksanakan dalam bentuk: (1) Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, berlangsung 6 hari (120 orang), (2) Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan di 4 kecamatan masing-masing 2 hari (160 orang tokoh masyarakat).

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dilaksanakan dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja (membentuk Tim Satgas Penegakan Peraturan Daerah) yang melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam bentuk Bimbingan dan Teknik Dasar Penindakan, berlangsung 5 hari (40 orang peserta).

20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan adalah :

Sekretariat Daerah Kota Parepare sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 10 bagian (Pemerintahan, Humas dan Protokol, Pembangunan, Ortala, Kesra, Ekonomi dan Penanaman Modal

Daerah, Pengembangan SDA, Hukum dan Perundang-undangan, Umum dan Keuangan). Anggaran Rp 33.013.828.750.

Bagian Tata Pemerintahan

Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Anggaran Rp 2.050.000.000. Kegiatan, antara lain Pembebasan, pengadaan dan pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah.

Program penataan daerah otonomi baru

Anggaran Rp. 350.000.000. Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (2) Pengadaan buku-buku administrasi kecamatan, kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga, serta (3) Bintek Administrasi dan pelayanan kecamatan dan kelurahan.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Anggaran Rp 110.000.000. Kegiatan, antara lain: (1) Penyusunan laporan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (EKPPM-PP No.6 Tahun 2008), (2) Sosialisasi masalah-masalah pertanahan bagi aparat kecamatan, kelurahan serta masyarakat Kota Parepare.

Bagian Humas

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi.

Kegiatan: (1) Penyediaan Bahan Penunjang Pelayanan Keprotokoleran dan Kehumasan dalam bentuk Plakat (Rp. 62.000.000). (2) Visualisasi Kegiatan Pemkot Parepare (Rp.64.675.000). Bentuknya berupa buku kumpulan foto kegiatan dan klipng yang dibukukan, serta kalender Pemerintah Daerah Kota Parepare. (3) Penerbitan Buletin / Majalah Bandar Madani (Rp. 27.000.000) untuk 1.228 eksemplar. (4) Operasionalisasi Website Pemkot Parepare (www.pareparekota.go.id) Rp. 59.940.000). Kegiatan ini fisik terealisasi 100 persen, sementara keuangan 93 persen atau ada sisa anggaran yang tidak dicairkan sebesar 4.395.000. (5) Operasionalisasi layanan Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan (SIPP) atau SMS Centre (Rp. 22.000.000). (6) Pembuatan Sambutan Walikota Parepare (Rp. 80.095.000). fisik berhasil terealisasi 100 persen dan keuangan 81 persen atau ada sisa anggaran sebesar Rp. 15.450.000. (7) Operasionalisasi Hotspot Lapangan Andi Makkasau 62.400.000, kegiatan ini berhasil

teralisasi secara fisik 100 persen. Begitu juga halnya dengan keuangan terealisasi 100 persen.

Program Peningkatan SDM Kehumasan. Program ini direalisasikan melalui kegiatan Operasionalisasi Satuan Tugas Protokol Pemerintah Kota Parepare. Program ini juga direalisasikan melalui pengadaan Pakaian Seragam Satgas Protokol Pemkot Parepare. Capaian program secara fisik 70 persen, sementara keuangan dari anggaran Rp. 65.000.000. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan Mobilitas Transpor Satgas Protokol Pemerintah Kota Parepare dengan masukan dana sebesar Rp. 30.000.000. Kemudian kegiatan Bintek Multi Media (Rp. 27.700.000).

Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Media Massa: (1) Kegiatan Kontrak Halaman Parepare Bandar Madani. (Rp.44.000.000), (2) Kegiatan Publikasi Kehumasan (Rp. 252.608.860), (3) Kegiatan Tudang Sipulung (Rp. 66.000.000) berhasil teralisasi sebesar 43 persen atau sisa dana sebesar 37.620.000.

Bagian Pembangunan

Anggaran Rp.4.317.600.000,- terealisasi Rp.3.069.952.575,- atau 71,10%. Kegiatan: *Sertifikasi nasional pejabat pelaksana teknis kegiatan dan panitia pengadaan barang dan jasa, Pembinaan administrasi, pelaporan, pemantauan, dan pengendalian kinerja kegiatan, Operasional Tim Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa (PAU), serta Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.*

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan: Penyusunan LAKIP Setdako dan AKIP Pemerintah Kota Parepare, Kegiatan penyusunan RENSTRA, Kegiatan peningkatan Karya Prestatif Aparat Pemerintah Kota Parepare, Pelaksanaan Training Karya Prestatif (PKP) bertempat di Hotel Sahid Makassar selama 4 (empat) hari mulai 26 Pebruari s/d 1 Maret 2009, Kegiatan Pembinaan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembinaan Kinerja SKPD meliputi penyusunan Standar Operation Procedure (SOP), Penyusunan Peraturan Walikota tentang Indikator Pelayanan Wajib SKPD, Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelayanan Publik dan Modul Pedoman Pelayanan Publik.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan dengan kegiatan : (1) Penyuluhan Masalah Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (2) Pelatihan Guru Mengaji dengan maksud untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam mengajarkan Al Qur'an kepada anak didiknya.

Program Upaya Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang dilaksanakan dengan kegiatan: (1) Pembinaan Pengawasan NAPZA & HIV/AIDS.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda yang dilaksanakan dengan kegiatan : (1) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota (2) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Propinsi (3) Amaliah Ramadhan (4) Pembinaan Anak Remaja.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan. Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan, serta Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah.

Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal

Kegiatan: Evaluasi Kinerja BUMD (Fit dan Proper Test Direksi PDAM), Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Parepare, Pameran Promosi dan Potensi Pembangunan Daerah Kota Parepare.

Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA)

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan: Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Buku Data Informasi Lingkungan Hidup Kota Parepare, yaitu 25 Exemplar Buku.

Program Kegiatan Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang bentuk kegiatannya menyediakan Buku dan CD (40 Buku dan 40 Keping CD).

Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD).

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan diantaranya:

Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Penanganan Masalah Hukum Pemda.,
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan Kegiatan yaitu antara lain Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk konsultasi baik konsultasi terkait penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Umum

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dilaksanakan dalam bentuk 11 (sebelas) kegiatan pengadaan, 7 (tujuh) diantaranya merupakan pengadaan baru yang terdiri dari: *i) pengadaan kendaraan dinas/operasional* untuk bagian hukum Setdako yakni 1 (satu) unit kendaraan roda dua; *ii) pembangunan pagar dan halaman pada rujab Wakil Walikota*; *iii) pengadaan gorden untuk Rujab Walikota dan Wakil Walikota*; *iv) pengadaan lampu hias* yakni lampu pijar dan batteray kering untuk kantor Sekretariat Daerah Kota dan rujab Walikota dan Wakil Walikota; *v) pengadaan Sound Sistem 1 (satu) set, LCD 1 (satu) set dan AC 3 (tiga) unit* yang diperuntukkan untuk ruang data Setdako parepare; *vi) Pengadaan Mebeleur Ruang Rapat Asisten* yakni 1 (satu) buah white board, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) buah meja rapat dan kursi kerja untuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra; *vii) Pengadaan Genset untuk kantor Walikota Parepare* namun belum terealisasi dan akan dianggarkan kembali untuk tahun 2011. Kemudian 10 (sepuluh) kegiatan pemeliharaan rutin/berkala, 2 (dua) kegiatan merupakan kegiatan baru yakni *pemeliharaan rutin/berkala lampu neon box* untuk lapangan tennis rujab Walikota dan jembatan penyebrangan rujab Walikota. Dan *penataan halaman kantor Walikota*. Adapun kegiatan pemeliharaan yang tidak terealisasi yaitu *pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor* yang akan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran 2011.

Bagian Keuangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Anggaran Rp. 621.775.000. Kegiatan: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Anggaran Rp 25.000.000. Kegiatan (1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, (2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun serta (3) Penyusunan Anggaran SKPD.

Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dilaksanakan dengan 4 kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian kinerja yaitu terwujudnya dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan dokumen penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan dengan 62 kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian kerjanya dimana capaian realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing item kegiatan hampir seluruhnya diatas rata-rata 75.00%. Salah satunya Penyusunan standar satuan harga dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian kinerja.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama dan dilaksanakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dan terlaksana sebanyak 20 kali pertemuan. dengan anggaran sebesar Rp 99.260.000 dan realisasi sebesar Rp 99.070.000 atau 99,81 %.

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dilaksanakan dalam bentuk: *i) rapim dewan terlaksana sebanyak 13 kali; ii) rapat badan musyawarah terlaksana sebanyak 16 kali; iii) rapat komisi terlaksana sebanyak 19 kali; iv) rapat badan anggaran terlaksana sebanyak 9 kali; dengan anggaran Rp 305.732.500 dan realisasi sebesar Rp 223.368.500 atau 73,06 %.*

Rapat-rapat paripurna, dalam bentuk rapat paripurna sebanyak 45 kali; dan *ii) rapat paripurna istimewa (tidak ada). dari rapat tersebut menghasilkan Peraturan DPRD Kota Parepare sebanyak Tiga (3), keputusan DPRD Kota Parepare sebanyak 18 keputusan, dan keputusan pimpinan DPRD Kpta Parepare sebanyak Dua (2)*

keputusan. Dengan anggaran sebesar Rp 219.474.000 dan realisasi sebesar Rp 135.757.000 atau 61,88 %.

Kegiatan reses anggaran sebesar Rp 1.125.000.000 dan realisasi sebesar Rp 1.125.000.000 atau 100 %.

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kegiatan ini adalah merupakan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pimpinan dan anggota DPRD baik itu dilaksanakan diluar propinsi maupun dalam Propinsi Sulawesi Selatan. Dilakukan didalam propensi 5 kali ,luar propensi sebanyak 3 kali oleh tiap pimpinan dan anggota DPRD.dengan anggaran sebesar Rp 1.146.955.000 dan realisasi sebesar Rp 983.671.740 atau 85,78 %.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta Publikasi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dalam bentuk publikasi seluruh Perda yang dihasilkan oleh DPRD. dan terakhir adalah **Koordinasi dan evaluasi ranperda** dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 79.000.000 dan realisasi sebesar Rp 18.349.000 atau 23,23 %.

Inspektorat Daerah Kota Parepare

Pelaksanaan pemeriksaan: (1) Dugaan pelanggaran PP. 30 Tahun 1980 sebanyak 18 kasus, dan menerbitkan 18 LHP; (2) Dugaan pelanggaran PP. 10 Tahun 1983 sebanyak 21 kasus, dan menerbitkan 21 LHP; (3) Mutasi jabatan sebanyak 5 kali, dan menerbitkan 5 LHP; (4) Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 22 kasus, dan menerbitkan 22 LHP; (5) Pemeriksaan komprehensif/PKPT sebanyak 2 kali (10 SKPD), dan menerbitkan 10 LHP serta (6) Pemeriksaan evaluasi kegiatan sebanyak 1 kali (31 SKPD), dan menerbitkan 1 LHP.

Pelaksanaan rapat koordinasi: Rapat koordinasi sebanyak 8 kali dan rapat evaluasi sebanyak 12 kali.

Peningkatan profesionalisme: Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa sebanyak 4 kali, serta mengadakan Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan sebanyak 1 kali.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, program ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 944.127.900,- dan realisasi Rp. 801.736.355,- atau setara dengan 84,91%, antara lain: (1) Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi CPNSD, capaian kerjanya adalah CPNSD golongan I sebanyak 14 orang, golongan II sebanyak 230 orang dan golongan III sebanyak 68 orang telah memenuhi syarat lulus diklat prajabatan untuk dapat diangkat menjadi PNSD (100%); (2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD, dengan capaian kinerja adalah meningkatnya pengetahuan/ wawasan kepemimpinan PNS eselon II yang telah mengikuti diklatpim tingkat II sebanyak 4 (empat) orang dan diklatpim tingkat III sebanyak 40 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 40 orang. (3) Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD, dengan capaian kinerja adalah meningkatnya pengetahuan/ wawasan PNS dibidang diklat efektifitas strategi peningkatan kinerja aparatur/Pemda serta optimalisasi fungsi pengawasan internal terkait akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan disiplin pejabat eselon II dan III sebanyak 2 orang, diikutkannya observasi lapangan diklatpim tingkat II sebanyak 1 orang, diklatpim tingkat III sebanyak 3 orang dan tingkat IV sebanyak 1 orang dan meningkatnya pengetahuan dibidang diklat keuangan daerah sebanyak 1 orang PNS.

Kecamatan

Kecamatan Bacukiki: Kegiatan (1) *Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.* (2) *Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan*, realisasinya berupa Operasional PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan sebanyak 5 unit dan Pembinaan Imtaq melalui MTQ. Selain itu, Ibu – ibu yang ada di wilayah Kecamatan Bacukiki juga mempunyai wadah untuk berapresiasi dan berkreasi melalui organisasi PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan. Untu menunjang kegiatan dan administrasi PKK, maka Pemerintah Daerah memberikan anggaran untuk peningkatan kualitas dari PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan. Begitupun dengan Pembinaan IMTAQ melalui MTQ dapat dilaksanakan setiap tahunnya melalui lomba MTQ.

Kecamatan Ujung: (1) Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat, terdapat 5 (lima) kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010, yaitu kegiatan : Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat, dan Pembinaan IMTAQ dan organisasi kemasyarakatan. Juga Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RW/RT serta Intensifikasi Penagihan PBB dan Fasilitas Musrenbang Kecamatan.

Kecamatan Soreang. Realisasi dari program dan kegiatan yang menjadi prioritas urusan wajib di SKPD Kecamatan Soreang pada Tahun 2010 adalah : (1) Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, (2) Kegiatan Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan (3) Diklat ataupun bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai.

Kecamatan Bacukiki Barat : Kegiatan (1) *Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat* (2) *Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan*

Kantor Pelayanan Perizinan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dengan capaian kinerja terealisasinya program sistem jaringan komputer berupa penambahan Software 14 Jenis perizinan baru dari Dinas Kesehatan, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta penerapan sistem manajemen mutu tentang Revisi ISO dari Versii ISO 9001:2000 ke ISO 9001-2008, dari SAI GLOBAL dengan Pelaksanaan Audit Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2008. (Certificate of Registration option a QUALITY MANAGEMENT SYSYEM wich complis with the regkirements of ISO 9001:2008) dengan nomor cerficate No : QEC 28423 dengan masa berlakunya Issued : 07 Januari 2011 sampai dengan Expires : 06 Januari 2014, dan pelatihan pemahaman tentang penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 pada tanggal 18-19 November 2010 bertempat di parepare, untuk menciptakan aparat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan yang tinggi dan sangat menunjang dalam menciptakan exelen service.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Kegiatan: (1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Lomba Desa/Kelurahan). (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat. (3) Pembinaan Masyarakat Miskin.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : (1) Pelaksanaan pra musyawarah perencanaan pembangunan (pra musrenbang). (2) pemberian stimulasi pembangunan desa. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, (3) pelaksanaan Bulan Bakti Gorong

Royong Masyarakat. Bulan Bakti Gorong Royong Masyarakat dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Nasional, Provinsi sampai pada Tingkat Kabupaten/Kota.

21. Urusan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS melalui Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, sebanyak 80 orang (KK) dengan Target 80 orang atau 100 %.

Program pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan mengadakan pelatihan kepada Anggota Tagana sebanyak 49 orang dengan target 49 orang atau 100 %. Kegiatan Pelayanan orang terlantar dengan Target 75 orang dan hanya teralisasi sebesar 35 Orang atau 46,67%, Rehabilitasi tempat-tempat bersejarah, Pembangunan Gudang Peralatan Bencana dan Stimulans pemberdayaan bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal dengan Capaian Kinerja masing-masing kegiatan adalah 100%.

Program Pembinaan Anak Terlantar melalui kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar dengan dengan capaian kinerja 100 % dan mengadakan pelatihan /keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar sebanyak 30 orang dengan Target 30 orang atau 100 %.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidan,PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya.

Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

22. Urusan Kearsipan

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan, melalui kegiatan Pengumpulan data, yakni kegiatan yang dilakukan pada seksi kearsipan dengan mengumpulkan arsip yang sifatnya in aktif dari beberapa SKPD (27 SKPD se-Kota Parepare, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengklasifikasian data yang mana data yang telah terkumpul dari beberapa SKPD dikelompokkan berdasarkan kelas dan penggolongannya, selanjutnya Penyusunan Sistem Katalog Data yaitu Arsip disusun berdasarkan sistem katalog data dan pada program ini kegiatan pengadaan sarana penyimpanan yaitu mengadakan 2 (dua) unit lemari arsip sehingga mampu menangani arsip dengan mekanisme pengarsipan yang lebih memadai.

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, melalui kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yaitu pengadaan 100 buah Box file yang digunakan untuk menempatkan arsip yang telah dikelola pada Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan, dengan tujuan untuk melestarikan dokumen/arsip daerah.

23. Urusan Perpustakaan

*Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, bertujuan untuk memasyarakatkan budaya baca dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk menyediakan bahan bacaan dengan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan yang jumlahnya sebanyak 1.050 judul /3.190 eksemplar sehingga bahan bacaan menjadi 7.290 judul/ 18.900 eksemplar (**Data Per 2009 : jumlah buku 6.240 judul/ 15.710 eksemplar**).*

PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

1. Penyelenggaraan Urusan Pertanian (Tanaman Pangan), Peternakan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengembangan pertanian (tanaman pangan), peternakan, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 7.040.477.275,-, dengan realisasi anggaran adalah Rp 6.251.466.128,- atau sebesar 95.75 persen.

Bidang Pertanian, dilaksanakan dalam bentuk pengembangan pembenihan/pembibitan, intensifikasi dan rehabilitasi hutan rakyat, dan penanaman pola pekarangan. Keseluruhan program dan kegiatan telah terealisasi 100%. Pada kegiatan pengembangan pembenihan/pembibitan telah disediakan 4.500 kg benih unggul yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksi jagung. Realisasi kegiatan lainnya adalah rehabilitasi kebun rakyat seluas 50 ha, sosialisasi terhadap 100 orang yang bergerak di bidang perkebunan rakyat. Sedangkan pada kegiatan penanaman pola pekarangan telah terealisasi penanamannya terhadap 500 orang kk dilengkapi 1.500 pohon tanaman kelapa hibrida.

Bidang Peternakan, program dan kegiatan keseluruhan telah terealisasi 100%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya kesehatan ternak dan unggas masyarakat sebanyak 28.000 ekor

dengan hasil yang diharapkan adalah penurunan penyakit menular pada ternak.

Bidang Kehutanan, program dan kegiatan telah terealisasi 100% dengan output kegiatan adalah penanaman dan pemeliharaan tanaman Aren sebanyak 600 pohon, penanaman dan pemeliharaan tanaman produksi sebanyak 19 jenis, penanaman dan pemeliharaan tanaman spathodea sebanyak 3.600 pohon, tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan burung walis, pembinaan terhadap 5 kelompok tani hutan rakyat, serta pelaksanaan patroli dan operasi gabungan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 11 kali, pelaksanaan sosialisasi tentang keamanan kawasan hutan sebanyak 1 kali.

Bidang Perikanan dan Kelautan, program dan kegiatan secara keseluruhan telah terealisasi 100%. Keluarannya adalah pembuatan kolam budidaya ikan air tawar dan ikan air payau untuk 3 jenis yaitu ikan mas, ikan lele, dan udang vannamee. Selain itu telah dibangun pula sarana dan prasarana pengembangan budidaya perikanan air tawar sebanyak 10 unit, penyediaan sarana pembibitan perikanan berupa keramba jaring apung sebanyak 1 set, pelatihan terhadap kelompok usaha perikanan termasuk didalamnya bantuan bagi usaha kelompok perikanan tangkap berupa peralatan penangkapan.

2. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata yang diwujudkan dengan pelaksanaan pemilihan duta wisata kota Parepare; Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri, yang diwujudkan dengan keikutsertaan Kota Parepare pada kegiatan pekan budaya dan potensi wisata baik dalam skala lokal/provinsi, Nasional maupun event Internasional.

Program pengembangan destinasi pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi yang diwujudkan dengan sosialisasi perda usaha kepariwisataan.

Program pengembangan kemitraan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kemitraan pariwisata, dimaksudkan sebagai upaya menggalang kerjasama serta pemahaman yang sama tentang pentingnya untuk menjaga dan melestarikan keberadaan obyek-obyek wisata.

3. Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral serta Perindustrian dan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengembangan energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan. Anggaran Rp 5.393.492.600,-, dengan realisasi Rp 4.551.378.283,- atau sebesar 95.99 persen.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk penataan dan pendataan lahan pertambangan bahan galian C diwilayah Kota Parepare khususnya diwilayah DAS Karajae secara berkala. Pada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C telah disusun dokumen serta peta lokasi tambang bahan galian golongan C disepanjang DAS Karajae sehingga memudahkan dalam pemantauan aktifitas tambang yang dilakukan masyarakat.

Bidang Perindustrian

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, program ini dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan dalam penguasaan teknologi sortasi, packing dan labelling terhadap 40 orang pengusaha IKM sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) pengusaha IKM dalam penguasaan teknologi dan informasi pengembangan produk.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, program ini dilaksanakan melalui kegiatan perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur sebagai upaya peningkatan SDM pengusaha IKM yang menguasai teknologi industri sebanyak 85 orang yang dilakukan melalui 2 angkatan.

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, program ini dilaksanakan sebagai upaya pengembangan dan monitoring sentra-sentra industri potensial yang dilakukan melalui 2 kegiatan. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan KUB profil sentra industri dilaksanakan dalam rangka kelancaran akses antara pengusaha dan Pemerintah serta pendataan kelompok usaha bersama dan sentra.

Bidang Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan konsumen termasuk fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen serta peningkatan tertib ukur serta tertib barang beredar dan jasa.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, program ini dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi kemudahan perizinan untuk pengembangan usaha, meningkatkan kemampuan mengembangkan akses pasar dan fasilitas distribusi dalam rangka pengendalian harga pokok komoditi tertentu untuk menjaga stabilitas harga, selain itu dilakukan upaya peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan serta penataan kios/los pasar semi modern lakessi, pembangunan pasar agribisnis Wekkee, renovasi dan pengembangan sarana distribusi pasar Labukkang kota Parepare sebagai salah satu upaya perbaikan sarana pasar tradisional sebagai pendukung aktifitas dan kelancaran kegiatan perdagangan di wilayah Kota Parepare dan juga kegiatan sosialisasi dan pemindahan pedagang pasar lakessi ke lokasi pasar baru.

B. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi : kerjasama antar daerah; kerjasama daerah dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah; pencegahan dan penanggulangan bencana; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

1. Kerjasama Antar Daerah

Bidang Kerjasama

Pelayanan Transportasi Kawasan Perkotaan yang bersifat Aglomerasi dalam Wilayah Kapet Parepare, meliputi Kabupaten Sidrap, Kota parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang. Wujud kerjasama yang diharapkan adalah pelayanan angkutan moda dari Bandara Hasanuddin Mandai dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Wilayah Kapet Parepare.

Nama Kegiatan

Pengembangan jaringan transportasi kawasan perkotaan yang bersifat aglomerasi pada wilayah Kapet Parepare, meliputi Kabupaten Sidrap, Kota parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang yang kemudian diberi nama **MARUPASIDAPI AJATAPPARENG** (**Massenrenpulu** (Enrekang), **Barru**, **Parepare**, **Sidrap** dan **Pirang**) yang bermakna berkumpul

untuk bersatu saling melengkapi, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Daerah masing-masing.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Bidang Kerjasama

- a) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo IV Cabang Parepare
- b) Nota Kesepahaman dengan PT. Lumsifa Indonesia Mandiri dan Keonsae Corporation SDN BHD.
- c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor
- d) Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia

Nama Kegiatan

- e) Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Atas Pengoperasian Eks Dermaga Ternak.
- f) Kerjasama pengelolaan Sampah Perkotaan Menjadi Produk Bermanfaat.
- g) Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tumbuhan.
- h) Kerjasama Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2010.

2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal yang pada prinsipnya terdiri dari tiga, yakni Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

3. Pembinaan Batas Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Penegasan batas wilayah sampai saat ini belum ada perkembangan yang memadai, harapan kita selaku Pemerintah Kota Parepare, agar supaya diadakan kembali pertemuan yang dihadiri langsung oleh para pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui secara pasti keberadaan batas daerah tersebut. Selain itu perlu ada

penegasan sikap oleh pemerintah Propinsi maupun pusat, terkait dengan sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh daerah-daerah yang bermasalah dengan batas wilayah dengan Kota Parepare.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sepanjang Tahun 2010 telah terjadi beberapa kali bencana, seperti angin kencang/puting beliung sebanyak 7 kali kejadian yang mengakibatkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan berat maupun ringan. Untuk bencana kebakaran telah terjadi 6 kali kejadian yang menghancurkan dan menimbulkan kerusakan rumah warga serta bencana longsor terjadi 5 kali kejadian masing-masing di Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Lumpue dan Kelurahan lakessi.

Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana melalui APBD Tahun 2010 Pos Bantuan anggaran Tak Terduga (**Bagian Kesra Setdako dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah**) selama Tahun 2010 telah dibayarkan sebagai bantuan anggaran perbaikan rumah dan lain-lain peruntukannya serta pemberian bantuan pada korban **bencana tanah longsor di Wasior dan Mentawai serta korban letusan Gunung Merapi** dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 73.800.000,-

6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berkenaan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sangat disadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Di bidang ketentraman dan ketertiban, kita patut bersyukur bahwa kondisi Kota Parepare relatif stabil, aman dan terkendali. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan dan senangtiasa siap sedia serta terus waspadan dengan tetap menjaga dan memelihara suasana kondusif ini yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang kita pedomani dan junjung tinggi bersama.

F. PENUTUP

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dijelaskan dalam laporan ini, sesungguhnya adalah merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin bersama sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Parepare, secara jujur dan sangat disadari masih terdapat banyak kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 ini kami publikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Kota Parepare pada khususnya dan oleh seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan, saran pendapat ataupun tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui **SMS CENTRE** Pengaduan Masyarakat **081-241350077** atau berkunjung langsung pada kantor kami melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan atau pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78, Telepon: 0421-21157 psw. 132, 133,108,117 Fax: 0421-21090. Untuk mendapatkan informasi secara mendetail dan selengkapny mengenai Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2010 dapat dibuka melalui website Pemda Kota Parepare (www.pareparekota.go.id). *Sekian dan Terima Kasih!*

Parepare, Mei 2010
Pt. WALIKOTA PAREPARE,
WAKIL WALIKOTA

H. SJAMSU ALAM